

Potensi Kebocoran APBN 2014 Untuk Kepentingan Politik Menjelang Pemilu 2014

DALAM konteks menjelang pemilu 2014, secara politis sangat dimungkinkan adanya manipulasi anggaran. Praktik-praktik tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik baik dalam model program kegiatan maupun bantuan/subsidi. Peluang pemanfaatan maupun kebocoran anggaran untuk kepentingan kampanye terselubung makin besar apabila transparansi anggaran dan informasi, serta keterlibatan publik terhadap politik anggaran, relatif rendah.

FITRA menemukan ada 4 (empat) potensi kebocoran APBN 2014 yang di asumsikan akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014, antara lain:

1. **BUMN sebagai “Sapi Perahan”**: Laba di tahan sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi di manfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014
2. **Alokasi dana optimalisasi sebesar Rp 26,9 triliun yang syarat kepentingan menjelang pemilu 2014**, tanpa dibarengi evaluasi kinerja K/L dan berpotensi menjadi dana titipan menjelang pemilu 2014
3. **Program-program populis dengan total Rp 52,9 triliun**: tersebar di beberapa program, seperti Bantuan Siswa Miskin, PKH, SJSN dan PNPM berpotensi sebagai alat mobilisasi di daerah
4. **Bantuan Sosial sebesar Rp 75,7 triliun tersebar di 14 K/L**: dimana Rp 25,6 triliun tersebar di 10 Kementerian/Lembaga dengan Menterinya berasal dari Partai Politik

Berdasarkan hasil temuan, FITRA mendesak kepada pemerintah untuk melakukan transparansi dan informasi dalam penggunaan anggaran yang berpotensi bocor tersebut untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2014, kepada publik.

**Hormat Kami
Yenny Sucipto
Sekjend FITRA**

Cp: 081333111446